

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
PERUBAHAN**



**KECAMATAN MANGUNREJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Mangunreja yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota,



sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Mangunreja disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.
17. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 002 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Mangunreja Tahun 2023;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Mangunreja pada Tahun 2023.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Mangunreja Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Mangunreja dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangunreja Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat  
Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra  
Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan  
fungsi perangkat Daerah

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan  
Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MANGUNREJA**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mangunreja Tahun 2022, Tahun Berjalan 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Mangunreja**

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mangunreja Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Mangunreja adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Mangunreja yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Mangunreja;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Mangunreja;
3. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Mangunreja.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Mangunreja pada tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan diimplementasikan dalam 25 bentuk sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mangunreja Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.1.1.



Tabel 2.1.1.  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MANGUNREJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MANGUNREJA s/d TAHUN 2022  
DAN TAHUN BERJALAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2024)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan		Target Program dan Kegiatan (Renja) Desember	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah		Realisasi Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01	KECAMATAN MANGUNREJA									
7 01	KECAMATAN									
7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mangunreja	N/A	N/A	59 (CC)	N/A	N/A	60 (CC)	N/A	0.00
7 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47	9	9	9	100.00	9	27	57.45
7 01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37	7	7	7	100.00	7	21	56.76
7 01	001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100.00	2	6	60.00
7 01	001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7 01	001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7 01	001	001	67	15	14	14	100.00	12	41	61.19
7 01	001	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7 01	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7 01	001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7 01	001	002	35	7	7	7	100.00	7	21	60.00
7 01	001	005	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
7 01	001	006	24	0	0	0	0.00	12	12	50.00
7 01	001	008	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
7 01	001	009	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00



7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Kantor	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	#DW/01
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	01	001	2.08	002	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100.00	12	12	36	36	60.00	
7	01	001	2.08	004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100.00	12	12	36	36	60.00	
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	01	001	2.09	001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	35	7	7	7	100.00	7	7	21	21	60.00	
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	0	0	0	0.00	12	12	12	12	50.00	
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	15	3	3	3	100.00	3	3	9	9	60.00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja	80.42	80.42	80.50	80.5	100.00	80.85	80.59	80.21	100.21		
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21	5	4	4	100.00	12	21	21	100.00		
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20	4	4	4	100.00	12	20	20	100.00		
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	0	0	0.00	0	1	1	100.00		
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	30	6	6	6	100.00	6	18	18	60.00		









Berdasarkan tabel 2.1.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mangunreja s/d Tahun 2022 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 59, tidak tercapai, karena tidak ada penilaian dari Inspektorat.
  - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
2. Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
  - f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
  - g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
  - h. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - i. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
  - j. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja, yaitu realisasi Tahun 2022 sebesar 80.50 poin dari target 80.50 poin atau sebesar 100%, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 98,71 %.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
- a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah
    - Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Mangunreja;



- Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
  - b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :
    - Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;
    - Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  - c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan Mangunreja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
  - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangunreja**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangunreja dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

**Tabel 2.2.1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022		2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mangunreja	Poin	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	N/A	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada penilaian dari Inspektorat, jadi masih menggunakan target Renstra	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja	Poin	80.50	80.85	81.20	81.55	80.50	81.00	81.50	81.75	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya diharapkan IKM setiap tahun dapat meningkat sebesar 0,2%	
3	Persentase peningkatan Status Desa	%	N/A	N/A	25%	25%	N/A	25%	25%	25%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada kegiatan karena tidak ditunjang oleh anggaran	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan	
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan	



Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja;

➤ Faktor pendorong:

meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

SDM pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Faktor penghambat:

SDM aparatur dan masyarakat yang kurang cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat

kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

c) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.

➤ Faktor penghambat:

Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

➤ Faktor pendorong:

Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.

➤ Faktor penghambat:

Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam penyusunan pelaporan yang sering terlambat.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.

2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :

a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mangunreja, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.

b) Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.



### **2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Mangunreja**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mangunreja dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mangunreja sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Mangunreja dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
  - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mangunreja tidak tercapai karena disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
  - b) Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mangunreja, antara lain :

Sekretariat

  - a. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Mangunreja, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

#### Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

#### Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Mangunreja;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Mangunreja

#### Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.



- e. Lambatnya aparaturnya Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;  
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Mangunreja, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal Renja PD Kecamatan Mangunreja tidak ada perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap Rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4.1 berikut.



Tabel 2.4.1  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**

No.	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Per	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
									Menjadi	Menjadi		
1	KECAMATAN MANGUNREJA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	KECAMATAN MANGUNREJA				2,131,004,922	KECAMATAN MANGUNREJA					2,203,049,476	1,899,666,004
	KECAMATAN MANGUNREJA				2,131,004,922	KECAMATAN MANGUNREJA					2,203,049,476	1,899,666,004
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			60 (CC)	1,913,154,922	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			60 (CC)		2,043,864,476	1,740,481,004
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13	15,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13		0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mangunreja		7	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mangunreja		7		0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mangunreja		2	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mangunreja		2		0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mangunreja		4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mangunreja		4		0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			%	1,686,889,922	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			%		1,844,654,476	1,516,271,004
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mangunreja		14	1,686,889,922	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mangunreja		14		1,844,654,476	1,516,271,004
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10	5,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0		0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mangunreja		14	5,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mangunreja		0		0	0



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	44,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	61,960,000	75,991,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mangunreja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	15,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mangunreja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	29,500,000	36,685,500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mangunreja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	3,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mangunreja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	6,213,000	6,665,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mangunreja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mangunreja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mangunreja Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	10,950,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mangunreja Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3,600,000	5,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mangunreja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	10,950,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mangunreja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	22,647,000	27,641,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mangunreja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	41,265,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mangunreja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mangunreja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	41,265,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mangunreja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mangunreja Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mangunreja Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	51,400,000	53,400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mangunreja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mangunreja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12,800,000	12,800,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mangunreja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	15,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mangunreja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	38,600,000	40,600,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mangunreja Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	91,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mangunreja Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	85,850,000	94,818,500



Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mangunreja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	41,265,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mangunreja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>51,400,000</b>	<b>53,400,000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12,800,000	12,800,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	15,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	38,600,000	40,600,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>91,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>85,850,000</b>	<b>94,818,500</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mangunreja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	75,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mangunreja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	75,650,000	84,618,500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mangunreja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mangunreja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	3	11,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	3	3	10,200,000	10,200,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja</b>	<b>80.85</b>	<b>57,600,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja</b>	<b>80.85</b>	<b>80.85</b>	<b>47,820,000</b>	<b>47,820,000</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Mangunreja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	25,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Mangunreja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	6	14,090,000	14,090,000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	25,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	14,090,000	14,090
Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12	15,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12	15,000,000	15,000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	15,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	15,000,000	15,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	1	17,600,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	1	18,730,000	18,730
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12	17,600,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12	18,730,000	18,730
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	25%	30,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	25%	0	0
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	0	30,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	0	0	0



Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	30,000,000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	0
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>9,000,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60,600,000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>5</b>	<b>9,000,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>60,600,000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	9,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	5	60,600,000
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>		<b>Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti</b>		<b>Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Undangan dan/atau Kepolisian Indonesia	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Undangan dan/atau Kepolisian Indonesia	0	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Undangan dan/atau Kepolisian Indonesia	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Undangan dan/atau Kepolisian Indonesia	0	0	0

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	101,500,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	25,000,000	25,000,000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	25,500,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	25,000,000	25,000,000
Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	750	76,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	0	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Mangunreja	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	19,750,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Mangunreja	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	25,765,000	25,765,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mangunreja	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100%	100%	19,750,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mangunreja	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100%	100%	25,765,000	25,765,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	6	8,750,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	6	11,510,000	11,510,000
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	0	5,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6	6	6,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6	6	14,255,000	14,255,000

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Mangunreja. Namun dalam proses ini Kecamatan Mangunreja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Mangunreja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun usulan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 dari para pemangku kepentingan Kabupaten sebagaimana tabel 2.5.1.

**Tabel 2.5.1**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mangunreja

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	4 Dokumen	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mangunreja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MANGUNREJA**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Renja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Mangunreja Tahun 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Mangunreja merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Mangunreja melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Mangunreja didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun prioritas dan sasaran Kecamatan Mangunreja sebagaimana pada tabel 3.2.1.

**Tabel 3.2.1**  
**Prioritas dan Sasaran Kecamatan Mangunreja**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
1	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kec. Mangunreja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Mangunreja
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kec. Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja
				Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase peningkatan Status Desa
				Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
					Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani
Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan					

Hubungan antara tujuan Kecamatan Mangunreja dengan sasaran Kecamatan Mangunreja sebagaimana pada tabel berikut.



**Tabel 3.2.2**  
**Tujuan Kecamatan Mangunreja**

<b>No.</b>	<b>Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023</b>
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Mangunreja	60 (CC)

**Tabel 3.2.3**  
**Sasaran Kecamatan**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.	60 Poin
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.85 Poin
3.	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan Status Desa	25%
4.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

**Tabel 3.2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mangunreja**

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Mangunreja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Mangunreja	60 Poin
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Mangunreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mangunreja	80,85 Poin
3.	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase peningkatan Status Desa	25%
4.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Mangunreja	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

Dari prioritas pembangunan daerah, sasaran daerah Kabupaten Tasikmalaya serta tujuan dan sasaran Kecamatan Mangunreja tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Mangunreja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dapat terwujud.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANGUNREJA**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Mangunreja tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dimana kegiatan dan sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Mangunreja adalah :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya misi nomor 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Adapun program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Mangunreja Tahun 2023 adalah sebagai berikut pada tabel 4.1.1.

**Tabel 4.1.1**  
**Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Mangunreja**

No	Sasaran Perangkat Daerah		Nama Program/Kegiatan
I.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Mangunreja	1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Mangunreja	2. 2.1 2.2 2.3	Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
III	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Mangunreja	3. 3.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
IV	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Mangunreja	4. 4.1 5. 5.1 6. 6.1	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Rekapitulasi Program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas Pembangunan yakni :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta penurunan Angka Prevalansi Stunting
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ektrem
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk menunjang Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Inovasi Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kemandirian Desa
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Dari 10 Prioritas Pembangunan tersebut yang menjadi prioritas Kecamatan Mangunreja adalah Inovasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam 5 program, 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2023 sebagaimana tabel 4.1.2 dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mangunreja Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.1.3.

**Tabel 4.1.2**  
**Rekapitulasi Program dan Kegiatan**  
**Berdasarkan 10 ( sepuluh ) Prioritas Pembangunan Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		Ket
			Semula	Menjadi	
		<b>KECAMATAN MANGUNREJA</b>	<b>2,203,049,476</b>	<b>1,899,666,004</b>	
I	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,043,864,476	1,740,481,004	
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,844,654,476	1,516,271,004	
3.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61,960,000	75,991,500	
4.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0	
5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,400,000	53,400,000	
6.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,850,000	94,818,500	
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47,820,000	47,820,000	
7.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14,090,000	14,090,000	
8.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15,000,000	15,000,000	
8.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18,730,000	18,730,000	
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	0	
10.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	0	
IV		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60,600,000	60,600,000	
11.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60,600,000	60,600,000	
V		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25,000,000	25,000,000	
12.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,000,000	25,000,000	
13.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,765,000	25,765,000	
14.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,765,000	25,765,000	



7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0				0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Sekr	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%					Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100%	1,317,612,073		
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									14	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1,317,612,073	Sekr	
7	01	001	2.05		Administrasi Perangkat Daerah					0%					Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100%	0	0	Sekr
7	01	001	2.0	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									0	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	0	0	Sekr
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%					Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	79,747,000		
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	32,000,000	Sekr	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									12	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	10,000,000	Sekr	
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									12	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	3,600,000	Sekr	











7	01	004	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	4	60,600,000	60,600,000	60,600,000	4	0	0	117,025,000	4	0	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Seksi Trantibum	
7	01	004	2.01	001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Seksi Trantibum
7	01	004	2.01	002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	60,600,000	60,600,000	60,600,000	4	0	0	117,025,000	4	0	0	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Seksi Trantibum
7	01	004	2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Perda dan Perkuda	Persentase Pelaksanaan PERKADA dan PERKUDA yang ditindaklanjuti	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	Persentase Pelaksanaan Perda dan Perkuda yang ditindaklanjuti	Persentase Pelaksanaan Perda dan Perkuda yang ditindaklanjuti	

7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Mangunreja	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	0	0	Sek Trantit
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN UKUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%			25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	100%	25,000,000	25,000,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%			25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	100%	25,000,000	25,000,000	



7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pereliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Mangunreja <sup>a</sup>			100	25,000,000	25,000,000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pereliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	25,000,000	5
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intra-suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Mangunreja <sup>a</sup>			0	-	0	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	0	5

7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mangunreja	0	0	0	0	0	0	0	0
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%		25,765,000	25,765,000	100%		25,765,000	25,765,000	100%	25,765,000
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		25,765,000	25,765,000	100%		25,765,000	25,765,000	100%	25,765,000
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mangunreja	6	0	DAU	0	0	0	6	0
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Mangunreja	6	11,510,000	DAU	11,510,000	11,510,000	6	11,510,000	P
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Mangunreja	6	14,255,000	DAU	14,255,000	14,255,000	6	14,255,000	£



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mangunreja tahun Anggaran 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Mangunreja Tahun 2023. Kecamatan Mangunreja sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mangunreja Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Mangunreja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mangunreja yang telah dirumuskan dan untuk menjamin

terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Mangunreja. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Mangunreja.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu



dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Mangunreja, 01 September 2023



**RAHMAT RAHMAT, S.Sos, M.Si**

NIP. 19680604 199403 1 005